

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Rizka Hayyuna and Ratih Nur Pratiwi (2016) meneliti tentang Strategi Manajemen Aset BUMDes Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Desa (Study pada BUMDes di Desa Sekapuk, Kec. Ujungpangkah, Kab. Gresik). Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah Strategi manajemen aset yang telah dilakukan oleh BUMDes di Desa Sekapuk telah berkontribusi sekaligus dapat meningkatkan pendapatan desa dari tahun 2010-2012. Namun masih ada yang harus diupayakan oleh BUMDes Sekapuk misalnya membuat sarana pemasaran seperti website yang dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat desa maupun masyarakat di daerah lain untuk mengenal produk layanan dari BUMDes di Desa Sekapuk.

Coristya Berlian Ramadana (2016) meneliti tentang Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguat Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kec. Dau, Kab. Malang. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah Sumber-sumber dana untuk peningkatan pendapatan desa yang diberikan oleh badan usaha milik desa masih belum dapat dikatakan memenuhi dan tidak meningkatkan pendapatan desa. Pembangunan desa secara mandiri seharusnya dengan berdirinya badan usaha milik desa ini, desa sudah dianggap menjadi desa yang mandiri. Seharusnya inilah yang menjadi motivasi tersendiri bagi desa landungsari. Akan tetapi yang terjadi dilapangan ialah bahwasanya badan usaha

milik desa ini juga masih belum berkontribusi penuh sebagai lembaga yang bergerak di bidang ekonomi.

Zulkarnaen (2016) meneliti tentang Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta Keberadaan BUMDes untuk mewujudkan perekonomian desa yang Mandiri sangat diperlukan. Melalui BUMDes diharapkan antar lembaga yang ada di masyarakat saling bersinergi untuk lebih maksimal menciptakan kesejahteraan masyarakat yang setara. Bagi pemerintah desa dan lembaga pedesaan di desa Parakan Salam dan desa Salam Jaya segera membentuk pengelolaan BUMDes supaya segera lebih efektif dalam menghimpun unit-unit usaha dari masyarakat dan pengelolaan aset-aset desa agar tujuan dari BUMDes untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat yang merata.

B. Landasan Teori

1. Desa

a. Definisi Desa

UU No. 6 Tahun 2014 menyatakan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Kewenangan Desa

Permendes No. 1 Tahun 2015 menjelaskan kewenangan desa adalah kewenangan yang dimiliki desa yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakara masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.

c. Pemerintahan Desa

Pemerintah desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Sesuai penjelasan UU No. 6 Tahun 2014 kepala desa merupakan kepala pemerintahan yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat (Rusmianto 2016).

2. Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah kebijakan pemerintah pusat yang memberi wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan mengurus dirinya sendiri dalam hal pemerintahan dan perekonomian agar pemerintah daerah lebih mandiri dalam menjalankan pemerintahan dan perekonomian daerah.

Menurut (Widjaja 2002a) menjelaskan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi

masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan daerah otonom, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan penjelasan mengenai otonomi daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

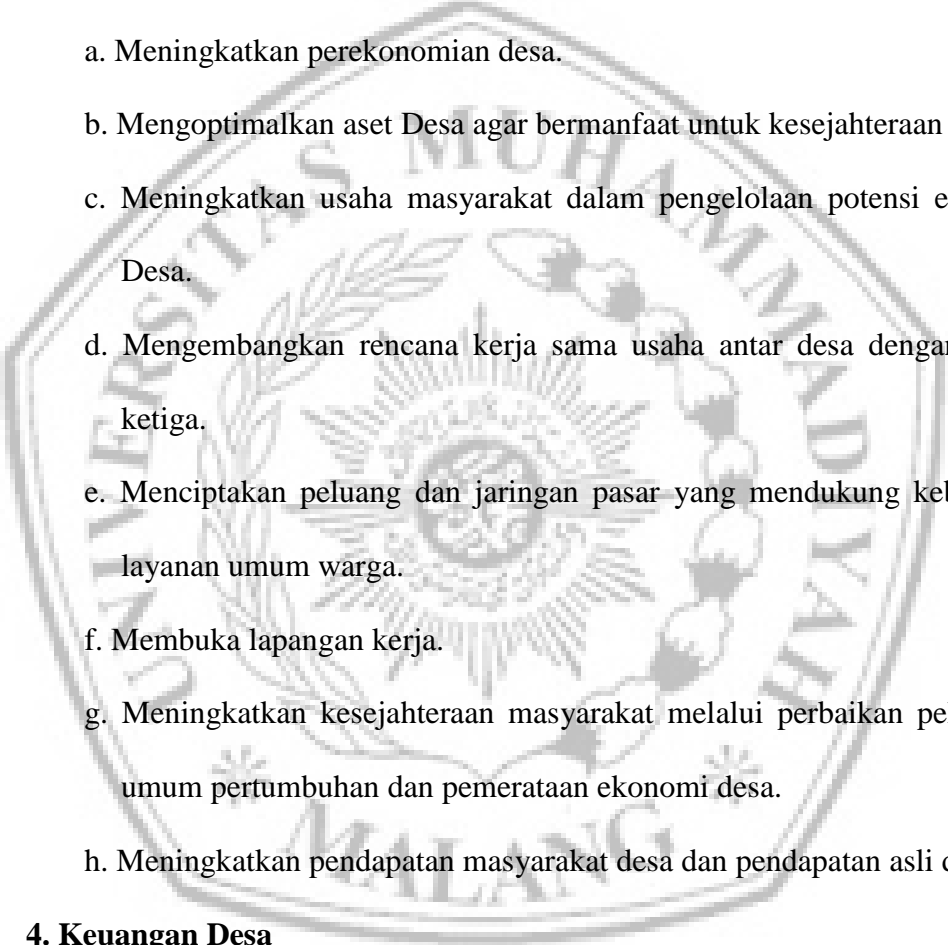
3. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Sedangkan menurut (Badriyadi 2012) mengemukakan bahwa Badan Usaha Milik Desa merupakan pilar perekonomian desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (sosial institution) dan komersial (commercial institution) yang berpihak pada kepentingan masyarakat serta mencari keuntungan.

Pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai wadah bagi masyarakat dalam seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan kerja sama antar desa.

Tujuan pendirian BUMDes seperti yang dijelaskan dalam UU No.6 Tahun 2014 adalah :

- 
- a. Meningkatkan perekonomian desa.
 - b. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa.
 - c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa.
 - d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dengan pihak ketiga.
 - e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
 - f. Membuka lapangan kerja.
 - g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.
 - h. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

4. Keuangan Desa

Salah satu hal terpenting dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan desa adalah keuangan desa. Pemerintah desa diharapkan dapat mengelola keuangan desa dengan efektif dan tepat sasaran sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan masyarakat desa. Pengelolaan

keuangan desa yang efektif dan efisien akan menunjang peningkatan pembangunan perekonomian desa

Menurut (Widjaja 2002b) dalam Buku Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa keuangan desa adalah pengurusan keuangan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa yang dipertanggungjawabkan pelaksana kepada desa berkewajiban melakukan keuangan secara teratur dan sesuai dengan perencanaan.

Menurut (Nurcholis 2011) bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

5. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 merupakan semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa berasal dari pendapatan asli desa, pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain.

Pendapatan asli desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa dalam menjalankan kegiatan ekonomi berdasarkan potensi yang dimiliki oleh desa termasuk juga hasil BUMDes, tanah kas desa.

Menurut (Rusmianto 2016) sumber pendapatan asli desa berasal dari :

- a. Hasil usaha.
- b. Hasil aset.

c. Swadaya, partisipasi dan gotong royong.

d. Lain-lain pendapatan desa.

Pendapatan asli desa lain-lain adalah hasil pungutan desa. Pendapatan lain-lain menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 terdiri atas :

a. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

b. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat adalah pemberian berupa uang dari pihak ketiga. Sedangkan lain-lain pendapatan desa yang sah adalah hasil kerja sama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

6. Aset

Pengertian aset menurut (Siregar 2004) adalah barang atau sesuatu barang yang memiliki nilai ekonomi (economy value), nilai komersial (commercial value), atau nilai tukar (exchange value) yang dimiliki oleh badan usaha, instansi atau individu. Bagi pemerintah daerah aset daerah merupakan sumberdaya yang sangat penting sebagai penopang pendapatan asli daerah. Oleh sebab itu pemerintah daerah harus dapat melakukan manajemen aset secara baik supaya pengelolaan aset dapat dilakukan secara maksimal.

Sumber aset daerah menurut (Aira 2014) yaitu :

a. Aset yang bersumber dari pelaksanaan APBD adalah merupakan output dari terealisasinya belanja modal dalam satu tahun anggaran.

- b. Aset yang bersumber dari luar pelaksanaan APBD adalah aset tidak diperoleh dari realisasi anggaran melainkan pemda menerima aset dari pihak lain, seperti lembaga donor dan masyarakat.

Pengelolaan aset daerah di atur dalam Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Lingkup pengelolaan meliputi :

- a. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran.
- b. Pengadaan .
- c. Penggunaan.
- d. pemanfaatan.
- e. Pengamatan dan pemeliharaan.
- f. Penilaian.
- g. Penghapusan.
- h. Pemindahtanganan.
- i. Penatausahaan.
- j. Pembinaan pengawasan dan pengendalian.

7. Strategi Manajemen Aset Daerah

Manajemen aset daerah melaksanakan pengelolaan aset/ Barang Milik Daerah (BMD) berdasarkan prinsip dasar-dasar manajemen aset terhadap aset/BMD dengan mengikuti landasan kebijakan yang diatur berdasarkan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keppres, Kepmen dan Surat Keputusan lainnya yang berhubungan dengan pengaturan/ pengelolaan aset daerah (Aira 2014).

David J Hunger dan Thomas L. Wheelen yang dikutip oleh (Joesron 2005) menyatakan bahwa strategi manajemen memiliki dasar pokok meliputi:

a. Mengamati lingkungan (enviromental scan-ning)

Mengamati lingkungan adalah kegiatan memonitoring faktor internal organisasi dan eksternal organisasi melalui konsep kekuatan (strength), kelemahan (weakness), kesempatan (opportunity) dan ancaman (threaths).

b. Penyusunan strategi (strategy formulation)

Penyusunan strategi membahas mengenai pengembangan rencana jangka panjang seperti penentuan visi dan misi, tujuan yang akan dicapai, mengembangkan strategi yang diwujudkan dalam suatu program maupun prosedur sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan organisasi.

c. Pelaksanaan strategi (strategy implementation)

Pelaksanaan strategi merupakan penerapan kebijakan-kebijakan yang telah ditentukan melalui pengembangan program, budget, dan prosedur. Pelaksanaan strategi pada setiap organisasi dapat berbeda-beda atau menyesuaikan dengan keadaan dari lingkungan organisasi tersebut.

d. Evaluasi atau kontrol

Untuk mengetahui apakah suatu organisasi berjalan sesuai dengan strategi yang telah disusun maka, organisasi memerlukan sebuah

pengawasan baik dari keanggotaan atau pihak internal maupun pihak ketiga atau eksternal.

Menurut (Hambali 2010) ada lima tujuan manajemen aset yaitu :

- a. Kejelasan status kepemilikan aset.
- b. Inventarisasi kekayaan daerah dan masa pakai aset.
- c. Optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan untuk meningkatkan pendapatan dimana aset berstatus sebagai idle capacity dapat dimanfaatkan sesuai peruntukkan yang ditetapkan.
- d. Mengidentifikasi dan mengetahui pemanfaatanya untuk apa, diperuntukan untuk siapa dan mendatangkan pendapatan bagi pengelola aset jika mampu mengelola aset sesuai dengan aturan yang berlaku.
- e. Pengamanan aset dan dasar penyusunan neraca.